

# Tata Kelola Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

Sri Riris Sugiyarti\*, Suwardi, Achmad Choerudin

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

\*e-mail: [ririss68@gmail.com](mailto:ririss68@gmail.com)

## *Abstract*

*This community service activity is in collaboration with the Family Empowerment and Welfare (PKK) organization, Mandan Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency. The problems faced in this organization are related to the management of administrative activities which are not well managed. This condition will make it difficult to administer important documents that can support the smooth running of PKK activities. This is because most of the PKK's activities are carried out without an administrative governance system. Likewise for other activities that are carried out without physical evidence but only in the form of verbal agreements without going through the stages of planning, implementation, reporting or evaluation. Based on these problems, the community service team at Slamet Riyadi University (Unisri) Surakarta provided outreach regarding the PKK administrative governance system in Mandan Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency. The method of implementing activities is carried out by holding socialization which aims to provide a good overview of the document administration system for PKK activities. Furthermore, providing assistance regarding the administration of PKK activity documents. Based on the results of the evaluation of community service activities, the results showed that PKK members were able to make an agreement by going through the stages of planning, implementation, reporting and evaluation for PKK activities in a simple form.*

**Keywords:** *Governance, Administration, Empowerment and Family Welfare*

## **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan yang dihadapi dalam organisasi ini adalah terkait dengan tata kelola kegiatan administrasi yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi tersebut akan menyulitkan tata kelola administrasi dokumen penting yang dapat menunjang kelancaran kegiatan PKK. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan PKK dilaksanakan tanpa adanya sistem tata kelola administrasi. Demikian pula untuk kegiatan lain yang dilaksanakan tanpa adanya bukti fisik melainkan hanya berupa kesepakatan secara lisan tanpa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun evaluasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian pada masyarakat Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta memberikan sosialisasi terkait dengan sistem tata kelola administrasi PKK di Kelurahan Mandan Kecamatan

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem administrasi dokumen kegiatan PKK dengan baik. Selanjutnya memberikan pendampingan tentang tata kelola administrasi dokumen kegiatan PKK. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diperoleh hasil bahwa anggota PKK telah dapat membuat kesepakatan dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi untuk kegiatan PKK dalam bentuk sederhana.

**Kata kunci:** Tata Kelola, Administrasi, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

## PENDAHULUAN

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan akses sumber daya, dan perbaikan infrastruktur sosial. Konsep pembangunan juga mencakup aspek-aspek seperti pembangunan manusia, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia menekankan pentingnya pengembangan kapasitas manusia dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan ketrampilan sehingga individu dapat mencapai potensi secara maksimal dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2020). Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam konsep pembangunan, yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Menurut Simon Sumanjyo Hutagalung (2022), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan mendukung pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, dan mengevaluasi program. Partisipasi masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal, memperkuat kepemilikan masyarakat terhadap proses pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Alexander (1994) dalam Ningrum (2022), pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, serta budaya. Pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan secara sengaja dengan melakukan perbaikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat (Tikson, 2005). Konsep tersebut merupakan prosedur pembangunan yang dilakukan diberbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik yang terlaksana pada level makro (nasional) dan mikro (*community* atau *group*). Pembangunan yang dapat terlaksana dengan baik mampu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat secara umum dapat ditinjau berdasarkan pada berbagai aspek, salah satunya adalah tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat berperan besar dalam proses pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui adanya pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (Graha, 2009). Terdapat

organisasi masyarakat yang berperan untuk mewadahi kegiatan keluarga dalam mencapai tingkat kesejahteraan, yakni Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyatakan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain yang mengordinasikan kelompok dasawisma. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa aspek penting dari PKK adalah pemberdayaan PKK yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui program kerja yang dilaksanakan PKK memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada keluarga dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, PKK berperan dalam meningkatkan kapasitas keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

Aspek partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam upaya pembangunan. PKK berusaha melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu kegiatan tersebut adalah memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang relevan dengan kebutuhan keluarga melalui pendekatan partisipatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKK dapat berperan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, terdapat pula aspek tujuan kesejahteraan keluarga yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat. PKK memiliki fokus utama pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya yang dilakukan meliputi berbagai hal kehidupan, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kegiatan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan yang baik. PKK juga berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah sosial di tingkat keluarga, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), narkoba, dan anak putus sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKK memiliki peran penting dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). PKK berusaha meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan melalui partisipasi aktif masyarakat.

Peran penting PKK dalam lingkungan masyarakat untuk menunjang pembangunan dapat ditingkatkan dengan adanya keterampilan anggota PKK dalam tata kelola administrasi. Administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengorganisir, mengelola, menjalankan suatu entitas atau terorganisasi secara efisien dan efektif (Hendrawan, 2019). Administrasi melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kila, 2017). Proses administrasi merupakan proses atau tindakan dalam melaksanakan aktifitas administrasi. Hal ini melibatkan pengelolaan dan pelaksanaan tugas-tugas administratif yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi. Serangkaian peran penting yang harus dilakukan oleh organisasi PKK ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi faktanya tidak didukung dengan adanya kemampuan sumber daya yang memadai. Kondisi ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya yang tersedia (Permatasari dkk., 2021). Proses administrasi PKK terkesan dilakukan seadanya, apabila kegiatan ini dilakukan dengan baik dan benar

maka akan memperkuat organisasi PKK. Oleh karena itu, pengetahuan dan ketrampilan pengurus PKK dalam bidang administrasi perlu untuk ditingkatkan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bekerja sama dengan organisasi PKK Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan yang dihadapi dalam organisasi ini adalah terkait dengan tata kelola kegiatan administrasi yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi tersebut akan menyulitkan tata kelola administrasi yang dapat menunjang kelancaran kegiatan PKK. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan PKK dilaksanakan tanpa adanya sistem tata kelola administrasi. Demikian pula untuk kegiatan lain yang dilaksanakan tanpa adanya bukti fisik melainkan hanya berupa kesepakatan secara lisan tanpa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun evaluasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian pada masyarakat Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta memberikan sosialisasi terkait dengan tata kelola administrasi PKK di Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh PKK Kelurahan Mandan. Tahapan pengabdian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

### **1. Penyusunan perencanaan dalam bentuk proposal**

Langkah awal dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menyusun proposal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Proposal kegiatan bertujuan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada pihak berwenang di lokasi pengabdian masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Unisri Surakarta. Tim Pengabdian Masyarakat dari Unisri Surakarta menjabarkan latar belakang, tujuan, manfaat, metode pelaksanaan, dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Proposal ini diajukan kepada pemerintah mitra untuk memperoleh perizinan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah mendapatkan perizinan pelaksanaan kegiatan dari mitra pengabdian masyarakat, proposal kegiatan juga diajukan kepada LP3M Unisri Surakarta yang akan melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas proposal yang diajukan sebelum kegiatan dapat dilaksanakan. Melalui penyusunan proposal dan pengurusan perizinan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh Tim Pengabdian Unisri Surakarta.

### **2. Pengurusan Perizinan Lokasi**

Perizinan kegiatan dilakukan sebagai bentuk kerja sama antar kemitraan antara LP3M Unisri Surakarta dengan organisasi PKK di Kelurahan Mandan. Selanjutnya, berdasarkan proposal kegiatan yang telah diajukan kepada ketua PKK Kelurahan Mandan, tim pengabdian pada masyarakat memperoleh izin pelaksanaan kegiatan. Selain itu, diperoleh pula tanggapan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan isi proposal kegiatan yang telah diajukan.

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan pre-test. Peserta diberikan soal pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta tentang tata kelola administrasi PKK. Pre-test terdiri dari

sejumlah pertanyaan pilihan ganda atau isian singkat yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui level pengetahuan peserta sebelum mengikuti kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi tata kelola administrasi PKK dengan metode ceramah. Materi yang disampaikan, meliputi pentingnya administrasi dalam organisasi PKK, jenis-jenis dokumen administrasi PKK, serta teknik penyusunan dan pengelolaan dokumen administrasi PKK. Peserta diberi kesempatan untuk mencatat hal-hal penting selama sesi ceramah.

Setelah sesi ceramah selesai, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Tim pengabdian masyarakat akan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Sesi tanya jawab ini bertujuan untuk memastikan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir sesi disampaikan kesimpulan dan poin-poin penting dari keseluruhan materi yang telah didiskusikan. Pemaparan kesimpulan ini bertujuan untuk menegaskan kembali pemahaman peserta terhadap tata kelola administrasi PKK.

Rangkaian kegiatan berikutnya peserta diberikan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan. Post-test berisi pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan pre-test sehingga dapat dibandingkan hasil sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil post-test akan menunjukkan sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta mengenai tata kelola administrasi PKK. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan peserta dan pengurus PKK Kelurahan Mandan dalam mengelola administrasi organisasi PKK dengan baik.

#### 4. Penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

Setelah rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat selesai, dilanjutkan dengan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pengabdian masyarakat kepada universitas. Hasil laporan kegiatan harus didesiminasikan dalam forum seminar nasional yang diselenggarakan rutin oleh LP3M Unisri Surakarta.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang tata kelola administrasi PKK di Kelurahan Mandan. Kegiatan ini bertujuan agar tata kelola administrasi PKK lebih tertib, rapi, teratur, dan mudah untuk dikelola. Pendampingan dilakukan untuk mengedukasi pengurus PKK dalam rangka mengelola administrasi PKK menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman tentang pengetahuan tata kelola administrasi PKK tergolong masih rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pre-test peserta yang menunjukkan bahwa hanya 5 dari 15 pertanyaan yang dapat terjawab dengan benar. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijadikan dasar bahwa perlu adanya edukasi terkait dengan tata kelola administrasi PKK. Pengelolaan administrasi PKK melibatkan serangkaian tahapan untuk memastikan program PKK dapat berjalan dengan efektif. Secara umum, berikut merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengelola administrasi PKK.

#### 1. Pembentukan Tim Penggerak PKK

Tahapan pertama adalah pembentukan tim penggerak PKK tingkat RT. Tim penggerak ini terdiri dari beberapa anggota PKK yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan tingkat RT.

#### 2. Perencanaan Kegiatan

Merencanakan kegiatan PKK yang akan dilaksanakan tingkat RT, meliputi menentukan jenis kegiatan, tujuan kegiatan, anggaran yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. Pengumpulan Data dan Identifikasi Kebutuhan

Mengumpulkan data dan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat tingkat RT terkait isu-isu yang menjadi fokus PKK, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya.

4. Menyusun Program

Menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat RT. Program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, kampanye, kegiatan kesehatan, pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya.

5. Pelaksanaan Program

Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, meliputi pengaturan jadwal, penentuan lokasi, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

6. Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Mengukur sejauh mana tujuan program yang telah tercapai, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

7. Pelaporan

Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, memaparkan hasil evaluasi, dan capaian program yang telah tercapai.

8. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Menjalani koordinasi dengan pihak terkait seperti RW, kelurahan, kecamatan dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan terbentuknya keselarasan program dengan tingkat yang lebih tinggi.

Secara umum, sebagian langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan oleh PKK Kelurahan Mandan tetapi tidak dilaksanakan secara terstruktur dan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga ketika dibutuhkan hanya berdasarkan pada ingatan dari masing-masing anggota. Misalnya kegiatan sosial tidak tercatat secara runtut dan sistematis selama waktu tertentu. Selain itu, jenis kegiatan yang telah dilaksanakan tidak memiliki laporan pertanggung jawaban yang terlampir. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Setelah memberikan edukasi terkait dengan tata kelola administrasi PKK dilanjutkan dengan pendampingan menyusun berbagai macam buku yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan kegiatan PKK. Berikut merupakan jenis buku yang disusun untuk pengelolaan administrasi dokumen PKK.

1. Buku Administrasi

Buku catatan administrasi berisikan data anggota PKK tingkat RT, agenda rapat, daftar kegiatan, dan catatan-catatan penting terkait pengelolaan PKK tingkat RT.

2. Buku Rapat

Buku rapat digunakan untuk mencatat hasil rapat tim penggerak PKK tingkat RT, termasuk pembahasan kegiatan, keputusan yang diambil, dan tindak lanjut yang harus dilakukan

3. Buku Inventaris

Buku inventaris yang digunakan untuk mencatat semua aset dan barang yang dimiliki oleh RT, seperti peralatan rapat dan barang-barang yang dimiliki oleh PKK tingkat RT.

4. Buku Catatan Kegiatan

Buku catatan kegiatan digunakan untuk mencatat kegiatan yang dilaksanakan PKK tingkat RT, seperti kegiatan sosial, kegiatan kesehatan, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh PKK tingkat RT.

5. Buku Catatan Keuangan

Buku catatan keuangan digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan PKK tingkat RT, sumbangan masyarakat, dana yang diterima, dan penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan PKK tingkat RT.

6. Buku Laporan

Buku laporan ini berisikan laporan-laporan kegiatan PKK tingkat RT, laporan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan yang mencatat capaian program, penggunaan dana, dan evaluasi kegiatan.

Jenis buku yang digunakan di PKK dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tata kelola administrasi di masing-masing RT, jenis-jenis buku tersebutlah yang dikerjakan selama kegiatan pendampingan tata kelola administrasi. Anggota PKK memiliki motivasi yang cukup tinggi selama kegiatan pendampingan berlangsung.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan

Rangkaian kegiatan berikutnya adalah peserta diberikan soal post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil post-test yang terdiri atas 15 pertanyaan hampir

semua peserta dapat menjawab dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang tata kelola administrasi PKK setelah diberikan edukasi berupa sosialisasi dan pendampingan.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait dengan tata kelola administrasi PKK mendapat tanggapan yang positif dari para peserta. Kondisi tersebut dapat terlihat dari antusiasme dan semangat para anggota PKK dalam mengikuti kegiatan dalam menyusun berbagai macam buku yang berfungsi untuk mencatat dan mendokumentasikan berbagai kegiatan di PKK tingkat RT. Terlaksananya kegiatan ini diharapkan tata kelola administrasi PKK di Kelurahan Mandan menjadi lebih tertib dan terorganisir. Pembukuan keuangan menjadi lebih rapi, dokumentasi kegiatan menjadi lebih lengkap, dan pembagian tugas pengurus menjadi lebih jelas. Selain itu semangat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKK juga meningkat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada LP3M Unisri Surakarta yang telah memberikan dukungan dana agar kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada PKK Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. Edisi III. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Graha, A.N. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117—126.
- Hendrawan, M.R. (2019). *Manajemen Pengetahuan: Konsep dan Praktik Berpengetahuan pada Organisasi Pembelajaran*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hutagalung, S.S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Kila, K.K. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(1), 5188—5200.
- Ningrum, L.A.P.S. (2022). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) (Studi pada Masyarakat Kawasan Pantai Wisata Kabupaten Malang). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(2), 105—113.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Permatasari, A. dan Sofyan, N. (2021). Pendampingan Tata Kelola dan Digitalisasi Administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). In *Prosiding Webinar Abdimas 4: Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Model Peningkatan Kapasitas Masyarakat Era Covid-19*, 361—368.
- Tikson, D.T. (2005). *Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. Makassar: Inninawa.

Tim Penggerak Pusat PKK. (2015). *Buku Hasil Rapat Kerja Nasional PKK Tahun 2015: Rumusan Hasil Rakernas VIII PKK*. Jakarta: Tim Penggerak Pusat PKK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.